

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Salah satu tujuan akuntansi keuangan daerah adalah untuk menyediakan Semua informasi keuangan lengkap, cermat dan akurat sehingga dapat dipertanggungjawabkan dan dapat digunakan sebagai dasar untuk mengevaluasi pelaksanaan keuangan terdahulu dalam rangka pengambilan keputusan ekonomi oleh pihak eksternal pemerintah daerah untuk masa yang akan datang sehingga penyampaian pertanggungjawaban dan disusun dengan mengikuti standar akuntansi pemerintah. Beka & Handayani (2022:1)

Standar akuntansi pemerintahan ditetapkan dengan peraturan pemerintah. Hal ini diatur dalam UU No. Ketentuan Nomor 71 Tahun 2010 tentang Keuangan Negara Kabupaten yang memerlukan bentuk dan isi laporan pertanggungjawaban Pelaksanaan APBN/APBD. Akuntansi desa merupakan proses pencatatan transaksi-transaksi yang terjadi di dalam desa. Pembuktiannya dengan catatan, kemudian pencatatan dan pelaporan keuangan untuk menghasilkan informasi berupa laporan keuangan untuk penggunaan orang-orang terkait di desa. Laporan Keuangan Desa merupakan bentuk persyaratan transparansi, persyaratan pendukung terdapat sistem pertanggungjawaban dalam bentuk publik (terbuka) kepada pemerintah desa yang lebih tinggi. Kegiatan pengelolaan sumber daya publik.

Sumber pendapatan desa antara lain pendapatan asli desa, pendapatan transfer dan pendapatan lainnya. Pendapatan asli desa terdiri dari harta, hasil swadaya, hasil usaha, penyertaan, gotong royong, dan lain-lain. Pendapatan transfer meliputi dana tingkat desa, pajak daerah kabupaten dan kota, sebagian hasil pemungutan daerah, dana tingkat desa yang dialokasikan kabupaten dan kota, serta subsidi keuangan yang diperoleh dari anggaran pendapatan desa provinsi, kabupaten, dan kota. Dana tingkat desa merupakan sumber pendapatan tingkat desa yang pengelolaannya mengikuti prinsip transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi, dilakukan secara

tertib, dan berpegang pada disiplin anggaran. Berdasarkan prinsip-prinsip tersebut, pengelolaan keuangan dapat membantu desa berkembang, sehingga meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa dan kualitas hidup masyarakat desa (Boyman 2020:2).

Desa yang mendapat pendanaan cukup tentu akan membawa kemajuan, dan desa mempunyai peluang untuk melakukan perubahan demi kepentingan masyarakat. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 menjadikan desa sebagai subjek pembangunan, yang tadinya hanya sebagai objek pembangunan, kini menjadi subjek pembangun kesejahteraan. Pendanaan desa yang signifikan diharapkan dapat meningkatkan kualitas hidup masyarakat desa, sehingga mengurangi kemiskinan dan masalah sosial lainnya. Tentu saja hal ini menjadi peran dan tanggung jawab yang besar bagi pemerintah desa. Oleh karena itu, pemerintahan desa harus menerapkan prinsip akuntabilitas dan seluruh kegiatan pemerintahan di tingkat desa harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat.

Menurut Dokumen Nomor 113 Kementerian Urusan Sipil Tahun 2014, dana desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), yang ditransfer ke desa melalui anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) kabupaten atau kota dan digunakan untuk penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, dan pendanaan pengembangan masyarakat dan pemberdayaan masyarakat. Pemerintah memasukkan dana tingkat desa ke dalam anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) setiap tahunnya. Dana dari anggaran pendapatan dan belanja negara dihitung berdasarkan jumlah desa kemudian dialokasikan berdasarkan jumlah penduduk, tingkat kemiskinan, luas wilayah dan kesulitan geografis untuk meningkatkan kesejahteraan dan pemerataan pembangunan desa.

Salah satu bentuk kepedulian pemerintah pusat Pembangunan pedesaan bergantung pada alokasi sumber daya Dana keuangan desa diberikan dalam bentuk dana yang berbentuk Alokasi Dana Desa (ADD). Yang ditransfer melalui Kabupaten/Kota. Di mana menambahkan alamat Sebagian dana perimbangan diterima oleh pemerintah daerah Kabupaten/Kota Sekurang-kurangnya 10%

(sepuluh persen) setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus (UU Desa No. 6 Tahun 2014 tentang desa Pasal 72). Transfer bertahap sebelum distribusi Pemerintah fokus dulu pada besaran dana tersebut nilai nominal yang akan diberikan kepada masing-masing desa adalah karena dana yang diterima berbeda-beda tergantung jumlahnya Populasi, tingkat kemiskinan, ukuran dan kesulitan geografis Untuk meningkatkan kesejahteraan dan pemerataan pembangunan desa.

Desa wajib membuat laporan keuangan untuk memberikan pertanggungjawaban realisasi anggaran dana yang dikeluarkan. Laporan pertanggungjawaban ini berpedoman pada Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa. Dan laporan keuangan tingkat desa yang telah dirilis diharapkan dapat memberikan gambaran informasi yang lengkap, menyeluruh, akurat dan tepat waktu berdasarkan periode Tata kelola hanya dapat dicapai melalui kepedulian, tanggung jawab, dan transparansi Tata kelola yang baik dapat mengarah pada akuntansi dengan cepat diterima dan dikenali.

Menurut IAI-KASP (Ikatan Akuntan Indonesia-Kompartemen Akuntan Sektor Publik) 2015, keuangan desa merupakan hak dan kewajiban desa berdasarkan Pasal 71 ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, yang dapat dinilai sebagai berikut: Uang dan segala uang dan barang yang berkaitan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban desa. Hal ini juga senada dengan penjelasan Pemdagri Nomor 113 Tahun 2014. Selain itu pada ayat (2) disebutkan bahwa adanya hak dan kewajiban akan berakibat pada penerimaan, pengeluaran, pembiayaan dan pengelolaan keuangan desa.

Pasal 93 ayat 1 mengatur bahwa pengelolaan keuangan desa meliputi: perencanaan, pelaksanaan, pengelolaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban. Pengelolaan keuangan desa merupakan suatu rangkaian siklus yang menyeluruh dan terpadu dari satu tahapan ke tahapan lainnya. Pengelolaan keuangan desa mengikuti prinsip transparansi, akuntabilitas, partisipasi, dan dilakukan secara tertib dan anggaran. Rangkaian dan prinsip pengelolaan keuangan tingkat desa harus dilaksanakan di setiap desa.

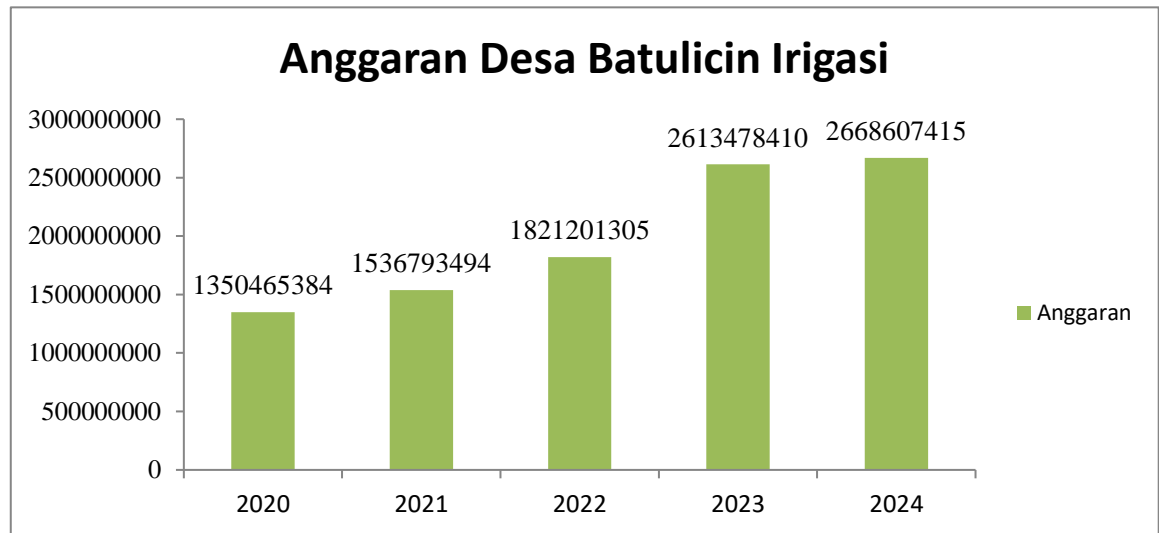
Boyman Zuliardi (2020) melakukan analisis dan kajian terhadap implementasi akuntansi pedesaan oleh Pemerintah Desa Ganting Kabupaten Solo Kabupaten

Jinbao. Penelitian ini menggunakan metode analisis deskriptif untuk mengumpulkan data, kemudian mengelompokkan dan mengorganisasikannya untuk penelitian berdasarkan teori-teori yang relevan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penerapan akuntansi keuangan di Desa Ganting Kecamatan Solo Kabupaten Kampar belum memenuhi prinsip akuntansi yang berlaku umum.

Ayu Mastang (2018) melakukan penelitian pada penerapan akuntansi di Kantor Desa Sappa Kecamatan Belawa. Penelitian ini menggunakan pendekatan analisis deskriptif kualitatif dengan menggunakan teknik pengumpulan data yaitu observasi, wawancara, dan dokumentasi. Hasil temuan menunjukkan bahwa Laporan Pengelolaan Keuangan Desa telah sesuai dengan Standar Pencatatan Keuangan Desa yang tertuang dalam laporan APBDesa.

Selain itu, uraian Laporan Keuangan Desa memberikan informasi mengenai hasil yang dianggarkan sebagai bagian dari kegiatan akuntansi Desa, yang dirinci pada bagian ini. Laporan pelaksanaan Sesuai Anggaran Deskripsi, namun masih mempunyai kekurangan dari segi anggaran. Bahwa penulis ingin mengetahui penerapan Akuntansi Keuangan di Desa Batulicin Irigasi Kecamatan Karang Bintang Kabupaten Tanah Bumbu. Perubahan anggaran pendapatan desa pada desa Batulicin Irigasi kecamatan Karang Bintang Kabupaten Tanah Bumbu tahun anggaran 2023, memiliki pendapatan asli desa sebesar Rp. 40.500.000, dana desa mencapai Rp. 733.305.000, alokasi dana desa sebesar Rp. 1.839.637.410, dan jumlah pendapatan transfer sebesar Rp. 2.572.978.410. Setiap tahunnya anggaran yang didapatkan Desa selalu mengalami kenaikan ataupun penurunan, seperti halnya anggaran yang didapatkan Desa Batulicin Irigasi yang selalu berubah-ubah setiap tahunnya. Adapun anggran yang didapatkan Desa Batulicin Irigasi selama lima tahun terakhir ini yaitu sebagai berikut:

Gambar 1. 1 Anggaran Desa Batulicin Irigasi Tahun 2020-2024



Sumber Anggaran Desa Batulicin Irigasi Tahun 2020-2024

Berdasarkan latar belakang diatas maka penulis ingin melakukan penelitian dengan judul Analisis Penerapan Akuntansi Keuangan Desa Pada Pemerintah Desa Batulicin Irigasi Kecamatan Karang Bintang Kabupaten Tanah Bumbu.

1.2 Rumusan Masalah

Adapun rumusan masalah pada penelitian ini yaitu bagaimana kesesuaian penerapan akuntansi pada Desa Batulicin Irigasi Kecamatan Karang Bintang Kabupaten Tanah Bumbu dengan Ikatan Akuntan Indonesia-Kompartemen Akuntan Sektor Publik.

1.3 Tujuan Penelitian

Bedasarkan rumusan masalah yang di kemukakan diatas, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kesesuaian penerapan akuntansi pada Desa Batulicin Irigasi Kecamatan Karang Bintang Kabupaten Tanah Bumbu dengan Ikatan Akuntan Indonesia-Kompartemen Akuntansi Sektor Publik.

1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian ini adalah sebagai berikut:

- 1) Bagi peneliti dari hasil penelitian ini dapat memberikan pengetahuan serta pemahaman mengenai penerapan akuntansi yang ada pada desa batulicin Irigasi.
- 2) Bagi pemerintah desa hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengembangan ilmu akuntansi dan sebagai acuan serta informasi apa bila masih terdapat kekurangan dalam penerapan akuntansi yang diterapkan di desa tersebut.
- 3) Bagi peneliti selanjutnya dari penelitian ini, dapat menjadi acuan dalam membuat tugas maupun skripsi serupa sebagai pembanding terhadap subjek yang sejenis agar penelitian ini bisa lebih baik dan sempurna.
- 4) Bagi masyarakat dapat mengetahui bagaimana penerapan dan pengelolaan akuntansi desa.

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

- 1) Pada tahap perencanaan Desa Batulicin Irigasi sudah sesuai dengan Perda Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 9 Tahun 2016 pasal 21, serta sesuai dengan Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 pada pasal 20.
- 2) Pada tahap perencanaan Desa Batulicin Irigasi sudah sesuai dengan Perda Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 9 Tahun 2016 pasal 25, serta sudah sesuai dengan Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 pada pasal 24.
- 3) Pada tahap penatausahaan Desa Batulicin Irigasi sudah sesuai dengan Perda Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 9 Tahun 2016 pasal 36, serta sudah sesuai dengan Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 pada pasal 35.
- 4) Pada tahap pelaporan Desa Batulicin Irigasi sudah sesuai dengan Perda Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 9 Tahun 2016 pasal 38, serta sudah sesuai dengan Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 pada pasal 37.
- 5) Pada tahap pertanggungjawaban Desa Batulicin Irigasi sudah sesuai dengan Perda Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 9 Tahun 2016 pasal 39, serta sudah sesuai dengan Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 pada pasal 38.

Berdasarkan kesimpulan pemerintah Desa Batulicin Irigasi Kecamatan Karang Bintang Kabupaten Tanah Bumbu belum sepenuhnya sesuai dengan Ikatan Akuntan Indonesia-Kompartemen Akuntan Sektor Publik.

5.2 Saran

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan pada Desa Batulicin Irigasi Kecamatan Karang Bintang, masih terdapat beberapa hal yang menjadi kekurangan atas pelaksanaan penerapan akuntansi yang dapat diberikan saran untuk

kelanjutannya atas kegiatan dan pengelolaan terhadap laporan pertanggungjawaban yaitu pencatatan terkait anggaran perlu ditingkatkan perhitungannya agar tidak terjadi kekurangan dana pada saat perealisasi atas program yang telah dianggarkan. Pemerintah desa harus lebih meningkatkan pengetahuan system pengelolaan keuangan desa dikarenakan desa Batulicin Irigasi menggunakan system online sehingga menuntut aparatur desa untuk lebih *up to date* dalam perkembangan informasi.

5.3 Keterbatasan Penelitian

Keterbatasan penelitian membahas hambatan-hambatan yang dihadapi dalam menyusun tugas akhir seperti jumlah sampel yang terbatas, keengganan responden dalam mengungkapkan informasi, dan lain-lain.

DAFTAR PUSTAKA

- Anam, Muchamad Choirul, et al. Analisis Penerapan Akuntansi Pada Kantor Desa Sobontoro Kecamatan Boyolangu, Kabupaten Tulungagung. *JAT: Journal Of Accounting and Tax*, 2022, 1.2: 96-106.
- Andayani, W. (2007). Akuntansi Sektor Publik. Malang: Bayumedia Publishing.
- Arifyanto, D.F dan Kurrohman, T. (2014). Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa di Kabupaten Jember. *Jurnal Riset Akuntansi dan Keuangan*. Volume 12 Nomor 2. Januari 2013: 94-103.
- Arista, C. (2019). Analisis Penerapan Akuntansi Desa Pada Desa Makmur Sejahtera Kecamatan Gunung Sahilan Kabupaten Kampar (Doctoral dissertation, Universitas Islam Riau).
- Beka, M. K., & Handayani, N. (2022). Analisis Akuntansi Keuangan Desa Pada Kantor Desa Ululoga Kecamatan Mauponggo Kabupaten Nagekeo. *Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi (JIRA)*, 11(5).
- Fitria, D. (2014). *Buku Pintar Akuntansi: Untuk Orang Awam & Pemula*. Jakarta: Penerbit Laskar Aksara.
- Hartika, T. (2019). Analisis Penerapan Akuntansi Keuangan Desa (studi Kasus Pada Kantor Desa Air Putih Kecamatan Lubuk Batu Jaya) (Doctoral dissertation, Universitas Islam Riau).
- Hery. 2017. *Teori Akuntansi Pendekatan Konsep dan Analisis*. Jakarta: PT Gasindo.
- Horngren, C. T., Warter, T., & Harrison Jr., W. T. (2017). *Akuntansi Jilid 1*. Jakarta: Erlangga.
- IAI-KASP. (2015). *Pedoman Asistensi Akuntansi Desa*.
- Indonesia. (2014). *Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa*. Jakarta: Kementerian Dalam Negeri.
- Indonesia. (2019). *Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2019*
- Kartohadikusumo, S. (1953). *Desa*. Yogyakarta: Indonesia Monographs.
- Martini, D., & Kawan-kawan. (2016). *Akuntansi Keuangan Menengah berbasis PSAKI*. Jakarta: Salemba Empat.

- Mastang, A. (2018). Penerapan akuntansi pada kantor desa sappa kecamatan belawa. *Jurnal Mahasiswa. Jurnal Mahasiswa Prodi Akuntansi. Universitas Muhammadiyah Makassar.*
- Munthe, N. A. (2020). *Analisis Penerapan Pengelolaan Dana Desa Pada Desa Siamporik Kec. Kualuh Selatan Kab. Labuhan Batu Utara* (Doctoral dissertation).
- Mustangin, M. A., & Rani, U. (2020). Permasalahan Pengelolaan Keuangan Desa Tinjauan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Magelang. *Jurnal Akuntansi dan Manajemen Mutiara Madani*, Vol 8(2).
- Nurani, D. (2019). *Analisis Penerapan Akuntansi Keuangan Desa Pada Desa Kabun Di Kecamatan Kabun Kabupaten Rokan Hulu* (Doctoral dissertation, Universitas Islam Riau).
- Octavia, A. D. (2022). *Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Desa (SAPDesa) Pada Kantor Desa Petung Kecamatan Bangsalsari* (Doctoral dissertation, UIN KH Achmad Siddiq Jember).
- Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 9 Tahun 2016 Pasal 17 *tentang Pelaporan dan pengelolaan Keuangan.*
- Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 9 Tahun 2016 Pasal 2 *tentang Tujuan dan Perinsip Penggunaan.*
- Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 9 Tahun 2016 Pasal 7 *tentang Prioritas Penggunaan Desa.*
- Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 2 Tahun 2008 Pasal 23 *tentang Pengelolaan Keuangan.*
- Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 9 Tahun 2016 *tentang Pengelolaan Keuangan Desa.*
- Putra, Abdika. (2019). *Analisis Penerapan Akuntansi Keuangan Desa Pada Desa Kebun Durian Kecamatan Gunung Shailan kabupaten Kampar* (Doctoral dissertation, Universitas Islam Riau)
- Redaksi KPPN Bukittinggi. (2021). *Dana Desa: Pengertian, Sumber Dana, Penyaluran Dana, dan Prioritasnya.*

- Sari, D. N., Mintarti, S., & Pattisahusiwa, S. (2018). *Analisis efektivitas dan efisiensi pelaksanaan anggaran belanja. Kinerja*, 15(1), 38-43.
- Sari, Y. P. (2023). *Penerapan akuntansi keuangan dana desa (dd) pada apbdes Desa Jambesari Kecamatan Jambesari Darus Sholah Kabupaten Bondowoso* (Doctoral dissertation, UIN KH Achmad Siddiq Jember).
- Satria, M. R., & Fatmawati, A. P. (2021). Penyusunan Laporan Keuangan Perusahaan Menggunakan Aplikasi Spreadsheet:(Pada PD Beras Padaringan). *Fair Value: Jurnal Ilmiah Akuntansi Dan Keuangan*, 3(2), 320-338.
- Sia, V. (2023). Akuntansi: Pengertian, Jenis Manfaat, dan Fungsi. *Jurnal Management accounting*.
- Siddiq, R. (2006). *Antropologi Sosial*. Jakarta: Pustaka Setia.
- Soemarso. (2018). *Akuntansi Suatu Pengantar 1*. Jakarta: Salemba Empat.
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif R&D* (Bandung: Alfabeta 2019)
- Sujarweni, V. W. (2015). *Akuntansi Dasar: Panduan Tata Kelola Keuangan Desa*. Yogyakarta: Pustaka Baru Press.
- Sujarweni, V. W. (2015). *Sistem Akuntansi*. Yogyakarta: Pustaka Baru Press.
- Suradadi. (2019). *Akuntansi Pengantar 1*. Yogyakarta: Gaya Media.
- Tentang Pedoman Pengelolaan keuangan Desa*. Jakarta: Kementrian Dalam Negeri.
- Tobing, D. (2021). *Analisis Penerapan Akuntansi Keuangan Pada Desa Kulim Jaya Kecamatan Lubuk Batu Jaya, Kabupaten Indragiri Hulu* (Doctoral dissertation, Universitas Islam Riau).
- Vanya Karunia Mulia Putri. (2023). Definisi Desa Menurut Para Ahli. *Kompas.com*.
- Warren, C., Reeve, J. M., & Fees, P. E. (2005). *Pengantar Akuntansi* (Edisi 21). Jakarta: Salemba Empat.
- Zuliardi, B. (2020). *Analisis Penerapan Akuntansi Keuangan Desa Pada Pemerintahan Desa Ganting Kecamatan Salo Kabupaten Kampar* (Doctoral dissertation, Universitas Islam Riau).